BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) merupakan konstitusi tertulis yang menjadi landasan hukum bagi Negara Indonesia dalam menjalankan pemerintahannya. Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia terbagi atas daerah-daerah yang urusan pemerintahannya dikelola oleh masing-masing daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Melalui Pasal 59 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU No. 23 Tahun 2014) telah termaktub bahwa tiap-tiap daerah akan dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah (kepala daerah) yang mana bagi daerah provinsi dipimpin oleh Gubernur, bagi daerah kabupaten dipimpin oleh Bupati, serta bagi daerah kota dipimpin oleh Walikota. Pasal ini merupakan pelaksanaan dari amanat UUD NRI Tahun 1945 terkhususnya Pasal 18 ayat (4), yang juga menegaskan bahwa masing-masing kepala pemerintahan daerah itu nantinya akan dipilih secara demokratis.

Kepala daerah di setiap daerah memperoleh legitimasi dari masyarakat daerah melalui mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Pilkada merupakan wujud pelaksanaan prinsip demokrasi sebagaimana yang telah diamanatkan UUD NRI Tahun 1945 dengan memberikan kesempatan kepada

rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi untuk memilih pemimpin secara demokratis. Esensi dari konsep kedaulatan tertinggi yang dipegang oleh rakyat sebagai penerapan prinsip demokrasi yang dianut Negara Indonesia terwujud dalam hak konstitusional yang dimiliki oleh rakyat selaku pemegang kedaulatan tertinggi untuk dapat mengatur serta mengawasi jalannya pemerintahan secara demokratis.¹ Prinsip demokrasi dalam penerapannya harus didampingi dengan norma hukum sebagaimana konstitusi tertulis Indonesia melalui UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hukum dijalankan atas prinsip demokrasi dan demokrasi diatur berdasarkan hukum yang berlaku. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU No. 1 Tahun 2015) dan perubahannya adalah norma hukum yang mendasari penyelenggaraan Pilkada sebagai amanat UUD NRI Tahun 1945.

Termaktubnya amanat untuk dilakukannya pemilihan secara demokratis dalam UUD NRI Tahun 1945 membuat pelaksanaan Pilkada harus memperhatikan prinsip-prinsip dari demokrasi itu sendiri, yakni kedaulatan rakyat. Frasa “dipilih secara demokratis” yang tertuang dalam UUD NRI Tahun 1945 pernah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengujian undang-undang terhadap

¹ Baharuddin Riqiey, 2023, “Penunjukan Kepala Daerah Oleh Presiden Dalam Perspektif Demokrasi”, *Call For Paper*, Vol. 3 No. 3 (2023), Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, hlm. 3.

Undang-Undang Dasar untuk setidaknya sebanyak 2 (dua) kali. Pemaknaan frasa ini tertuang dalam beberapa putusan yang meliputi: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072-073/PUU-II/2004 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013.²

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072-073/PUU-II/2004 memaknai frasa “dipilih secara demokratis” sebagai kewenangan pembuat undang-undang untuk memilih cara pemilihan langsung ataupun cara-cara demokratis lainnya. Pembuat undang-undang dalam pertimbangannya menghendaki agar pemilihan dilaksanakan dengan berpedoman pada asas-asas Pemilihan Umum (Pemilu) yang salah satunya adalah asas langsung, di mana rakyat sebagai pemilih dapat menggunakan hak konstitusionalnya secara langsung untuk menentukan pemimpinnya sebagai konsekuensi dari frasa demokratis tersebut. Berbeda dengan putusan sebelumnya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 memaknai frasa “dipilih secara demokratis” sebagai cara pemilihan yang dapat dilakukan secara langsung oleh rakyat maupun oleh DPRD yang keduanya dianggap tetap berada pada koridor demokratis. Berlakunya putusan ini membuat pembentuk undang-undang pada saat itu menerapkan cara pemilihan tidak langsung atau demokrasi perwakilan dengan kepala daerah baik Gubernur, Bupati, ataupun Walikota dipilih oleh DPRD melalui Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU No. 22

² Baharuddin Riqiey, 2023, “Penunjukan Kepala Daerah Oleh Presiden Dalam Perspektif Demokrasi”, *Call For Paper*, Vol. 3 No. 3 (2023), Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, hlm. 4.

Tahun 2014). Hal ini dilakukan atas pertimbangan bahwa di dalam Negara Indonesia masih terdapat pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa sebagaimana yang termaktub melalui Pasal 18B UUD NRI Tahun 1945.

Tepat 3 (tiga) hari setelah berlakunya UU No. 22 Tahun 2014, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Perppu No. 1 Tahun 2014) atas pertimbangan telah mendapat penolakan yang luas oleh rakyat serta proses pengambilan keputusan yang menimbulkan persoalan. Perppu No. 1 Tahun 2014 memandang frasa “dipilih secara demokratis” yang diamanatkan oleh UUD NRI Tahun 1945 sebagai kedaulatan rakyat dalam wujud demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Hal inilah yang kemudian mengubah sistem pemilihan tidak langsung (demokrasi perwakilan) menjadi sistem pemilihan langsung (demokrasi langsung) yang semakin dikuatkan dengan landasan yuridis melalui UU No. 1 Tahun 2015. UU No. 1 Tahun 2015 telah memenuhi tuntutan rakyat bahwa kedaulatan sesungguhnya tetap berada di tangan rakyat dan bukan pada kumpulan elit politik dengan kepentingan masing-masing.³

UU No. 1 Tahun 2015 melalui Pasal 3 kemudian menghendaki Pilkada diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun sekali secara serentak disertai uji publik. Undang-undang ini kemudian dilakukan perubahan dengan ditetapkannya

³ M. Zubakhrum B. Tjenreng, 2020, *Demokrasi Di Indonesia Melalui Pilkada Serentak.*, Papas Sinar Sinanti, Depok, hlm. 24.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU No. 8 Tahun 2015) yang menghapuskan ketentuan uji publik bagi calon kepala daerah. Ketentuan yang tertuang dalam Pasal 51 ayat (2) serta Pasal 52 ayat (2) undang-undang ini juga mengharuskan penyelenggaraan Pilkada untuk memiliki paling sedikit 2 (dua) pasangan calon. Adanya ketentuan ini sedikit menjadi penghambat oleh karena munculnya fenomena tidak terduga pada Pilkada tahun 2015 untuk pertama kalinya, yakni fenomena calon tunggal.

Fenomena calon tunggal dalam Pilkada pada tahun 2015 untuk pertama kalinya muncul di 3 (tiga) daerah, yakni Kabupaten Blitar, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Timor Tengah Utara.⁴ Kemunculan calon tunggal dirasa sebagai penghalang dalam penyelenggaraan Pilkada karena keberadaannya yang belum diakomodasi. Tidak diakomodasinya keberadaan calon tunggal dalam Pilkada ini akhirnya mendapat jawaban ketika ditetapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 yang mengamanatkan Pilkada dengan calon tunggal tetap dapat dilaksanakan melalui mekanisme pemilihan “setuju” atau “tidak setuju” setelah diupayakan secara maksimal untuk memperoleh paling sedikit 2 (dua) pasangan calon. Fenomena calon tunggal dalam Pilkada ini tidak berhenti di tahun 2015,

⁴ Dwanda J Sistyawan, 2023, *Demokrasi Pancasila Dalam Pemilihan Kepala Daerah Calon Tunggal Di Indonesia.*, Adanu Abimata, Indramayu, hlm. 5.

melainkan terus berlanjut bahkan mengalami peningkatan. Pada penyelenggaraan Pilkada tahun 2017, terdapat setidaknya 9 (sembilan) daerah yang memiliki calon tunggal meliputi 3 (tiga) kota dan 6 (enam) kabupaten.⁵ Peningkatan tren calon tunggal terus terjadi seperti pada tahun 2018 yang tercatat sebanyak 16 (enam belas) daerah meliputi 3 (tiga) kota dan 13 (tiga belas) kabupaten, serta tahun 2020 yang tercatat sebanyak 25 (dua puluh lima) daerah meliputi 4 (empat) kota dan 21 (dua puluh satu) kabupaten.⁶ Calon tunggal dalam Pilkada masih terus mengalami kenaikan hingga pada tahun 2024 sebagaimana yang tercatat oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) bahwa sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) daerah yang terdiri dari 1 (satu) provinsi, 5 (lima kota), dan 31 (tiga puluh satu) kabupaten kembali menghadirkan calon tunggal dalam Pilkada.⁷

Telah diakomodasinya keberadaan calon tunggal secara yuridis melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU No. 10 Tahun 2016) yang juga dilandaskan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015, ternyata tidak ditempatkan sebagai kondisi terakhir setelah sebelumnya “diusahakan secara sungguh-sungguh untuk memperoleh paling sedikit 2 (dua) pasangan calon”. Termaktubnya ketentuan

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*, hlm. 6

⁷ <https://infopemilu.kpu.go.id>, diakses 01 November 2024.

mengenai Pilkada yang tetap dapat diselenggarakan meskipun dengan calon tunggal pada nyatanya membuka peluang bahkan menaikkan tren kontestasi pemilihan dengan 1 (satu) pasangan calon. Hal ini turut menjadi perhatian lantaran frasa “dipilih secara demokratis” dan ditetapkannya cara pemilihan secara langsung oleh rakyat sebagaimana yang termaktub dalam regulasi merupakan landasan yang digunakan dalam penyelenggaraan Pilkada ini. Keberadaan calon tunggal mengurangi keberagaman pilihan bagi rakyat untuk dapat secara langsung memilih pemimpinnya. Keberadaan calon tunggal melawan kolom kosong seperti yang tertuang dalam Pasal 54C ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 juga dipandang kurang ideal oleh Titi Anggraini karena suatu pemilihan seharusnya menawarkan kompetisi dan adu gagasan, namun Pilkada dengan calon tunggal justru tidak memberikan alternatif lain kepada pemilih.⁸

Adanya urgensi ini membuat Penulis hendak melakukan analisis lebih dalam mengenai “Konstitusionalitas Calon Tunggal Dalam Pemilihan Kepala Daerah Terhadap Prinsip Demokrasi Di Indonesia” mengingat Negara Indonesia memegang prinsip demokrasi berdasarkan kedaulatan rakyat. Hadirnya calon tunggal dalam Pilkada menyisakan ragam pertanyaan mengenai bagaimana sesungguhnya konstitusionalitas keberadaan calon tunggal itu serta bagaimana konsekuensi calon tunggal dalam Pilkada terhadap perwujudan demokrasi di Indonesia.

⁸ *Titi Anggraini*, 2024, *Calon Tunggal di Tengah Pragmatisme dan Hegemoni Elite Politik*, hlm. 1 <https://law.ui.ac.id/calon-tunggal-di-tengah-pragmatisme-dan-hegemoni-elite-politik-olehtiti-anggraini-s-h-m-h/>, diakses 01 November 2024.

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada uraian latar belakang masalah di atas, maka Penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana konstusionalitas calon tunggal dalam Pilkada di Indonesia?
2. Bagaimana konsekuensi calon tunggal dalam Pilkada terhadap perwujudan demokrasi di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Penulis melakukan penelitian ini dengan tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menganalisis konstusionalitas calon tunggal dalam Pilkada di Indonesia.
2. Mengetahui dan menganalisis konsekuensi calon tunggal dalam Pilkada terhadap perwujudan demokrasi di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum secara umum dan secara khusus terhadap perkembangan ilmu di bidang hukum tata negara, terkait konstusionalitas dan konsekuensi calon tunggal dalam Pilkada terhadap perwujudan demokrasi di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap kajian di bidang hukum terkait konstusionalitas dan konsekuensi calon tunggal dalam Pilkada terhadap perwujudan demokrasi di Indonesia.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan edukasi bagi masyarakat secara umum terkait konstusionalitas dan konsekuensi calon tunggal dalam Pilkada terhadap perwujudan demokrasi di Indonesia.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul “Konstusionalitas Calon Tunggal Dalam Pemilihan Kepala Daerah Terhadap Prinsip Demokrasi Di Indonesia” merupakan karya asli Penulis dari hasil pemikiran dan bukan merupakan plagiasi. Sebagai pembanding, terdapat beberapa hasil penelitian lain yang memiliki kemiripan sebagai berikut:

1. Irham Har

Judul Penelitian : Konstusionalitas Calon Tunggal Kepala Daerah
Dalam Pemilihan Kepala Daerah

Tahun : 2023

Institusi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Rumusan Masalah :

1. Bagaimana pengaturan calon tunggal dalam undang-undang pemilihan kepala daerah?
2. Bagaimana fungsi partai politik dalam melahirkan calon kepala daerah?
3. Bagaimana konstusionalitas calon tunggal kepala daerah dalam prinsip negara demokrasi konstusionalitas?

Hasil Penelitian :

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai calon tunggal dalam UU Pilkada pertama kali diatur melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 dengan mekanisme pelaksanaan Pilkada calon tunggal yang dimuat dalam Pasal 54C UU Pilkada perubahan kedua guna menjalankan amanat konstitusi. Partai politik memegang peranan penting dalam menghasilkan calon-calon kepala daerah yang dapat dilakukan dengan mengusung pasangan calon tertentu dan membentuk koalisi besar. Konstusionalitas calon tunggal kepala daerah yang sejalan dengan prinsip negara demokrasi telah dinyatakan keberadaannya melalui UU Pilkada yang disertai perubahannya.⁹

⁹ Irham Har, 2023, *Konstusionalitas Calon Tunggal Kepala Daerah Dalam Pemilihan Kepala Daerah*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Letak Perbedaan :

Perbedaannya adalah bahwa skripsi yang ditulis oleh Irham Har meneliti tentang pengaturan mengenai calon tunggal disertai uraian yang secara khusus membahas peranan partai politik dalam kaitannya dengan pencalonan kepala daerah serta konstusionalitas calon tunggal yang dipandang dari prinsip negara demokrasi. Sedangkan skripsi Penulis meneliti terkait konstusionalitas calon tunggal dalam Pilkada yang dilengkapi dengan dinamika dan perkembangannya dari masa ke masa, serta menyajikan pembahasan mengenai faktor penyebab dan dampak kehadiran calon tunggal dalam Pilkada di Indonesia dilengkapi pula dengan kebaharuan informasi yang mengikuti perkembangan Pilkada serentak nasional tahun 2024.

2. Ita Kartika

Judul Penelitian : Impilkasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XII/2015 Tentang Pasangan Calon Tunggal Terhadap Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 Di Kabupaten Kebumen

Tahun : 2021

Institusi : Universitas Islam Negeri Prof. K. H Saifuddin Zuhri Purwokerto

Rumusan Masalah :

1. Bagaimanakah pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 di Kabupaten Kebumen dengan adanya calon tunggal?

2. Bagaimanakah implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XII/2015 Tentang Pasangan Calon Tunggal Terhadap Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Kebumen?

Hasil Penelitian :

Penelitian ini memberikan hasil bahwa pelaksanaan Pilkada dengan calon tunggal di Kabupaten Kebumen berjalan lancar. Keberadaan calon tunggal tetap sah sebagai proses demokrasi karena telah diatur melalui undang-undang meskipun esensi demokrasi tersebut menjadi berkurang. Implikasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XII/2015 adalah dikeluarkannya PKPU Nomor 14 Tahun 2015 oleh KPU dan masyarakat di Kabupaten Kebumen masih berpartisipasi secara antusias dalam Pilkada walaupun hanya dengan calon tunggal.¹⁰

Letak Perbedaan :

Perbedaannya yaitu skripsi yang ditulis oleh Ita Kartika meneliti tentang Pilkada dengan calon tunggal yang secara spesifik dilaksanakan di Kabupaten Kebumen, serta implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XII/2015 yang telah menjadi dasar pelaksanaan pelaksanaan Pilkada dengan calon tunggal. Sedangkan skripsi Penulis tidak meneliti secara spesifik terhadap penyelenggaraan Pilkada dengan

¹⁰ Ita Kartika, 2021, *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XII/2015 Tentang Pasangan Calon Tunggal Terhadap Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 Di Kabupaten Kebumen*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Prof. K. H Saifuddin Zuhri Purwokerto.

calon tunggal di satu daerah tertentu, melainkan meneliti secara umum terkait konstiusionalitas calon tunggal dalam Pilkada yang dilengkapi dengan dinamika dan perkembangannya dari masa ke masa, serta menyajikan pembahasan mengenai faktor penyebab dan dampak kehadiran calon tunggal dalam Pilkada di Indonesia dilengkapi pula dengan kebaruan informasi yang mengikuti perkembangan Pilkada serentak nasional tahun 2024.

3. **Hardiyanto**

Judul Penelitian : Pemilihan Umum Kepala Daerah Periode
2015/2020 (Studi Politik Hukum Calon Tunggal)

Tahun : 2016

Institusi : Universitas Muhammadiyah Magelang

Rumusan Masalah :

1. Bagaimana politik hukum calon tunggal pemilihan umum kepala daerah periode 2015/2020?
2. Kendala-kendala atau hambatan-hambatan apa yang timbul dari pelaksanaan calon tunggal dan upaya penyelesaian?

Hasil Penelitian :

Hasil penelitian oleh Hardiyanto menguraikan bahwa Pilkada wajib diselenggarakan meskipun hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon tanpa mengabaikan esensi dari demokrasi itu sendiri. Mahkamah Konstitusi memberikan solusi terkait pelaksanaan Pilkada dengan satu pasangan untuk mengatasi kekosongan hukum akibat lahirnya UU No. 8 Tahun

2015 melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015. Kehadiran calon tunggal menjadi pembelajaran baru dalam dinamika Pilkada bahwa demokrasi akan selalu berkembang secara dinamis dan hukum harus mampu mengikutinya.¹¹

Letak Perbedaan :

Perbedaannya adalah bahwa skripsi yang ditulis oleh Hardiyanto meneliti tentang calon tunggal dalam Pilkada pada awal kemunculannya di tahun 2015 disertai pembahasan mengenai kendala atau hambatan dan upaya penyelesaian termasuk kaitannya dengan esensi demokrasi itu sendiri. Sedangkan skripsi Penulis berfokus pada penyelenggaraan Pilkada dengan calon tunggal dalam kurun waktu 2015-2024, membahas pula mengenai konstusionalitasnya yang dilengkapi dengan dinamika dan perkembangannya dari masa ke masa, serta menyajikan pembahasan mengenai faktor penyebab dan dampak kehadiran calon tunggal dalam Pilkada di Indonesia.

F. Batasan Konsep

1. Konstitusi

Konstitusi adalah hukum tertinggi dan tertulis yang mengatur mengenai mekanisme penyelenggaraan negara dalam sebuah kumpulan

¹¹ Hardiyanto, 2016, *Pemilihan Umum Kepala Daerah Periode 2015/2020 (Studi Politik Hukum Calon Tunggal)*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang.

aturan meliputi pembagian kekuasaan negara guna membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak sewenang-wenang.¹²

2. Konstitusionalitas

Konstitusionalitas dalam Kamus Hukum Inggris, *Black's Law Dictionary*, dimaknai sebagai konsisten dengan konstitusi.

3. Demokrasi

Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani “*demos*” yang berarti rakyat dan “*kratos/kratein*” yang berarti kekuasaan/berkuasa.¹³ Demokrasi dimaknai sebagai kekuasaan rakyat.

4. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)

Berdasarkan Pasal 1 angka (1) UU No. 8 Tahun 2015, pemilihan gubernur, bupati, dan walikota adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara langsung dan demokratis.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum adalah suatu penelitian yang memiliki objek hukum, baik hukum sebagai suatu ilmu

¹² Indra Muchlis Adnan, 2017, *Hukum Konstitusi Di Indonesia.*, Trussmedia Grafika, Bantul, hlm. 7.

¹³ Yunita Syofyan, Delfina Gusman, dan Alsyam, 2022, “Keterkaitan Paham Demokrasi Terhadap Sistem Hukum Indonesia Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945” *Unes Law Review*, Volume 5, Issue 2, Desember 2022, Universitas Andalas, hlm. 500.

atau aturan maupun hukum sebagai perilaku dalam kehidupan masyarakat.¹⁴ Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang meneliti fakta-fakta hukum dan peraturan hukum yang relevan, disertai dengan pertanyaan-pertanyaan yang ingin dipecahkan.¹⁵ Penelitian ini menganalisis mengenai konstitusionalitas calon tunggal dalam Pilkada dilengkapi dengan dinamika dan perkembangannya dari masa ke masa, faktor penyebab, serta dampak kehadiran calon tunggal dalam kaitannya dengan prinsip demokrasi di Indonesia.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian hukum normatif ini membutuhkan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer bersifat mengikat bagi subjek hukum yang berupa dokumen hukum, sedangkan bahan hukum sekunder mempunyai sifat tidak mengikat terhadap subjek hukum.

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

¹⁴ Jonaedi Efendi dan Prasetijo Rijadi, 2022, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris.*, Kencana, Jakarta, hlm. 3.

¹⁵ Kristiawanto, 2022, *Memahami Penelitian Hukum Normatif.*, Prenada, Jakarta, hlm. 2.

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang; dan

3) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015.

b. Bahan Hukum Sekunder

- 1) Buku mengenai konstitusi, demokrasi, dan Pilkada;
- 2) Hasil penelitian mengenai konstiusionalitas, demokrasi, Pilkada, dan calon tunggal;
- 3) Jurnal mengenai konstitusi, demokrasi, Pilkada, calon tunggal, dan kolom kosong;
- 4) Pendapat hukum narasumber mengenai konstitusi, demokrasi, Pilkada, calon tunggal, dan kolom kosong; dan
- 5) Internet yang terkait dengan konstitusi, demokrasi, Pilkada, calon tunggal, dan kolom kosong.

3. Cara Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Cara pengumpulan data yang digunakan oleh Penulis adalah studi kepustakaan dengan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder, yakni peraturan perundang-undangan, buku, hasil penelitian, jurnal, pendapat hukum narasumber, dan internet yang kesemuanya memiliki hubungan dan keterkaitan dengan materi yang diteliti.

b. Wawancara

Penulis melakukan wawancara kepada narasumber guna memperoleh informasi yang lebih mendalam untuk mendukung dan melengkapi sumber data yang telah diperoleh sebelumnya terkait konstitusionalitas calon tunggal dalam pilkada serta konsekuensi atau dampaknya terhadap prinsip demokrasi di Indonesia. Penulis melakukan wawancara kepada:

- 1) Ibu Ibah Muthiah, S.H., M.Si., selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
- 2) Bapak Dr. Rahmat Muhajir Nugroho, S.H., M.H. selaku Dosen Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta.

4. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dilengkapi dengan data primer melalui wawancara kepada narasumber. Analisis dilakukan dengan menginterpretasi, menilai, dan memberikan pendapat terhadap data yang didapat melalui penelitian dengan bersumber pada aturan hukum, pendapat hukum dan teori yang relevan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.